KEBIJAKAN SATU PETA (*ONE MAP POLICY*) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Deputi Bidang Pengembangan Regional
Kementerian PPN/Bappenas

Disampaikan pada
Rapat Koordinasi Nasional Informasi Geospasial (Rakornas IG) 2016
Jakarta, 27 April 2016

PENDEKATAN PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKP 2017

REPUBLIK INDONESIA

Kementerian PPN/ Bappenas

Pendekatan *Money Follow "Program Prioritas"* → Pendekatan Holistik-Tematik, Terintegrasi & Spasial

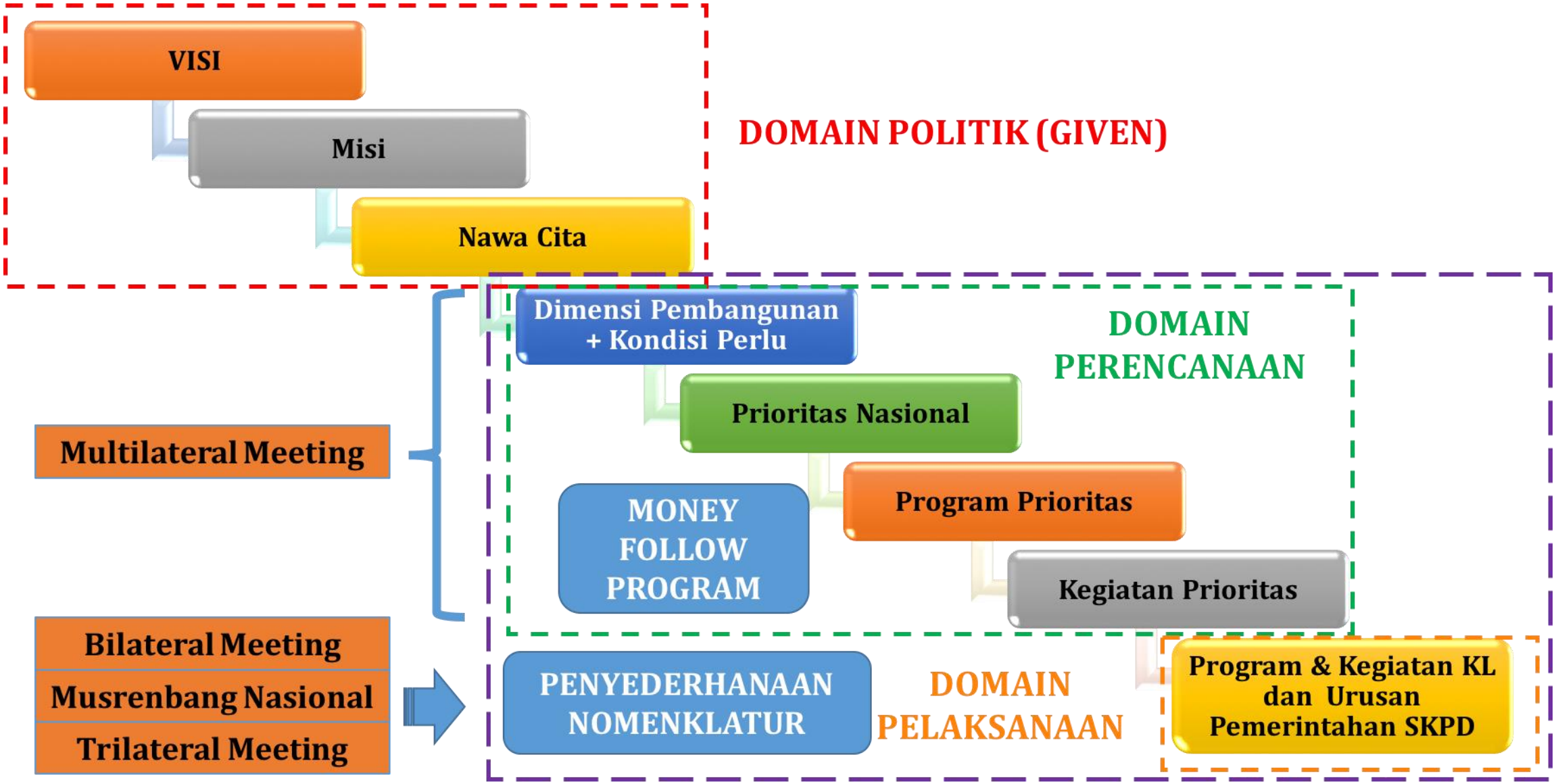

Pendekatan pembangunan

- **Holistik- Tematik**: Untuk mencapai sasaran prioritas nasional Kedaulatan Pangan, perlu koordinasi multi kementerian, yaitu antara lain Kementan, KemenPUPR, Kemen ATR, dan Kemen KLH, KemenPerdagangan serta Pemerintah Daerah.

- **Integratif:** Pencapaian Kedaulatan Pangan perlu dilakukan secara terintegrasi melalui peningkatan produktifitas lahan existing, menyetop konversi lahan produktif, reforma agraria, pencetakan sawah baru, pengembangan pertanian organik, pengendalian harga dan impor pangan, dan seterusnya (kombinasi berbagai program/kegiatan).

- **Spasial**: pembangunan sawah baru misalnya, harus mempertimbangkan lokasi, berdekatan dengan irigasi, terintergrasi dengan jalan, gudang, pasar, dan lain-lain.

ILUSTRASI RENCANA TERINTEGRASI BERDASARKAN *SPATIAL PLANNING* UNTUK PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI (KEK) BITUNG

REPUBLIK INDONESIA

Kementerian PPN/ Bappenas

PEMBANGUNAN JALAN TOL

URAIAN	TARGET	TAHUN PENGERJAAN	SUMBER PENDANAAN	PROGRESS
Pembangunan Jalan Tol Manado Bitung	7,3 km;	2015-2018	RM dan Pinjaman	Manado Bitung Lahan 97%;
	1 paket	2014-2018	KPS	Groundbreaking untuk Seksi I (porsi pemerintah) telah dilaksanakan sejak bulan Oktober 2014

PENGEMBANGAN BANDARA

URAIAN	TARGET	TAHUN PENGERJAAN	SUMBER PENDANAAN	PROGRESS
Pengembangan Bandara Sam Ratulangi Manado	N/A	N/A	N/A	N/A

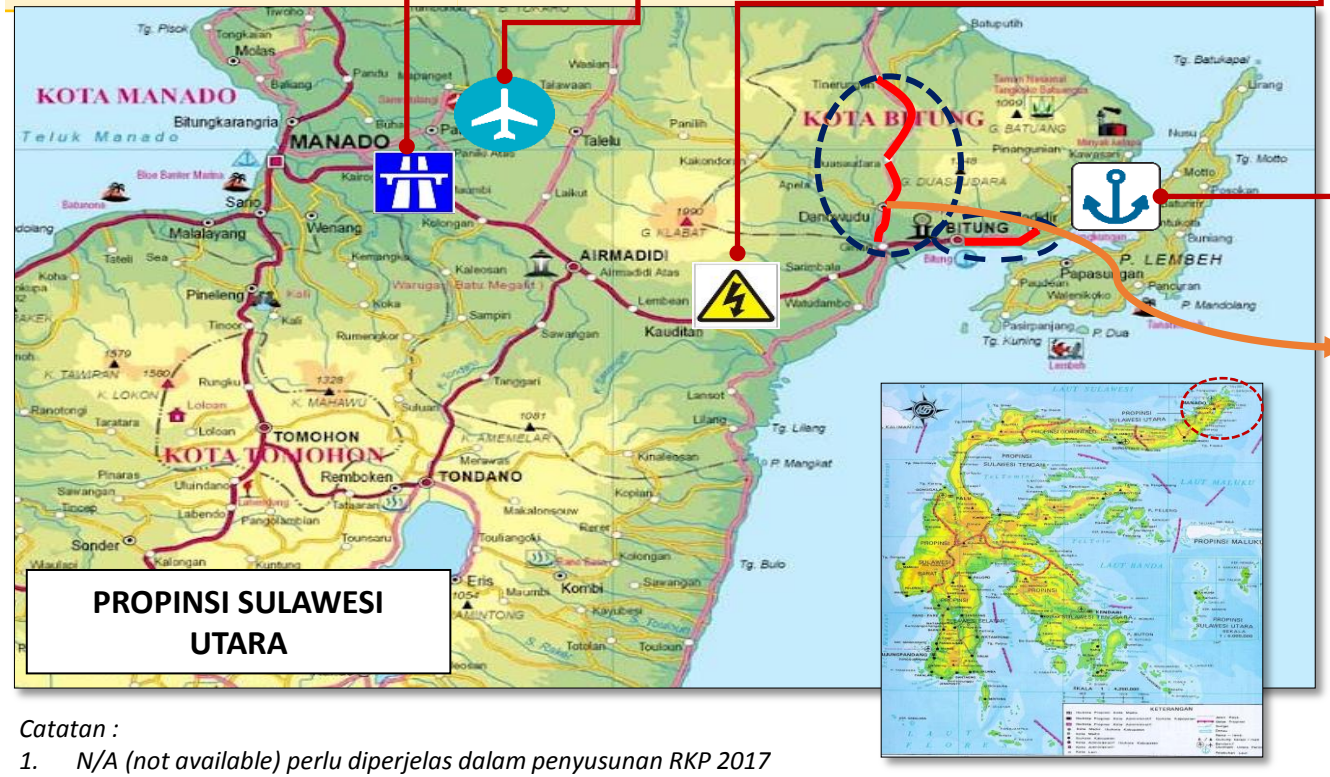

Catatan :

1. *N/A (not available) perlu diperjelas dalam penyusunan RKP 2017*
2. *Dukungan DAK Jalan hanya ilustrasi*

PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK DAN JARINGAN TRANSMISI

URAIAN	TARGET	TAHUN PENGERJAAN	SUMBER PENDANAAN	PROGRESS
Pembangunan PLTU Palu	N/A	N/A	N/A	N/A
Pembangunan PLTA Poso	N/A	N/A	N/A	N/A

PEMBANGUNAN/REHABILITASI PELABUHAN

URAIAN	TARGET	TAHUN PENGERJAAN	SUMBER PENDANAAN	PROGRESS
Pengembangan Pelabuhan Bitung (TPB)	1 paket	2015-2017	BUMN (PELINDO)	Dalam proses

REVITALISASI BALAI LATIHAN KERJA

URAIAN	TAHUN
Pembangunan/ Pengembangan BLK Bitung	2019

TEACHING FACTORY/TECHNOPARK DI SMK

URAIAN	TAHUN
pengembangan Teaching Factory/Technopark di SMK (1 unit di Sulawesi Utara)	2016

Dukungan DAK Bidang SARANA PERDAGANGAN & INDUSTRI

Kota Bitung, Kab. Minahasa Utara, Kota Manado, Kab. Minahasa

- Pembangunan Pasar Rakyat
- Pembangunan/ Revitalisasi Sentra IKM (Industri Kecil & Menengah)

Dukungan DAK Bidang TRANSPORTASI/ SubBid JALAN

- Pembangunan jalan baru akses menuju kawasan industri
- Pemeliharan berkala, peningkatan struktur/ kapasitas jalan, misal:
  - **Kota Bitung**: Jalan Wolter Mongisidi, ruas Bitung-Madidir
  - **Kab. Minahasa Utara**

    Jalan raya Likupang, ruas: Girian – Danowudu, Danowudu – Duasaudara,

Dukungan DAK Bidang PENDIDIKAN/ SubBid SMK

SMK INDUSTRI

Kota Bitung, Kab. Minahasa Utara, Kota Manado, Kab. Minahasa

- Pembangunan/ rehabilitasi ruang belajar/ perpustakaan/ruang praktik siswa/ laboratorium beserta perabotnya

1. **Perencanaan dengan apek spasial yang telah jelas**, seperti: Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, Destinasi Pariwisata, Kawasan Perbatasan, Daerah Tertinggal, dan lainnya.
2. **Perencanaan dengan aspek spasial yang perlu diskusi intensif dengan daerah**, seperti: pencetakan sawah baru, infrastruktur konektivitas, dan lainnya.
3. **Perencanaan dengan aspek spasial menyebar di daerah**, seperti: pendidikan, perumahan, dan lainnya.

PERKUATAN ASPEK SPASIAL DALAM MUSRENBANG NASIONAL (1/3)

Perencanaan dengan Aspek Spasial yang Telah Jelas

Mendetailkan kesiapan pelaksanaan proyek (seperti: Lahan, *Detail Engineering Design* (DED))

REPUBLIK INDONESIA

PERKUATAN ASPEK SPASIAL DALAM MUSRENBANG NASIONAL (1/3)

Peta Pembangunan Industri dan KEK

Kementerian PPN/ Bappenas

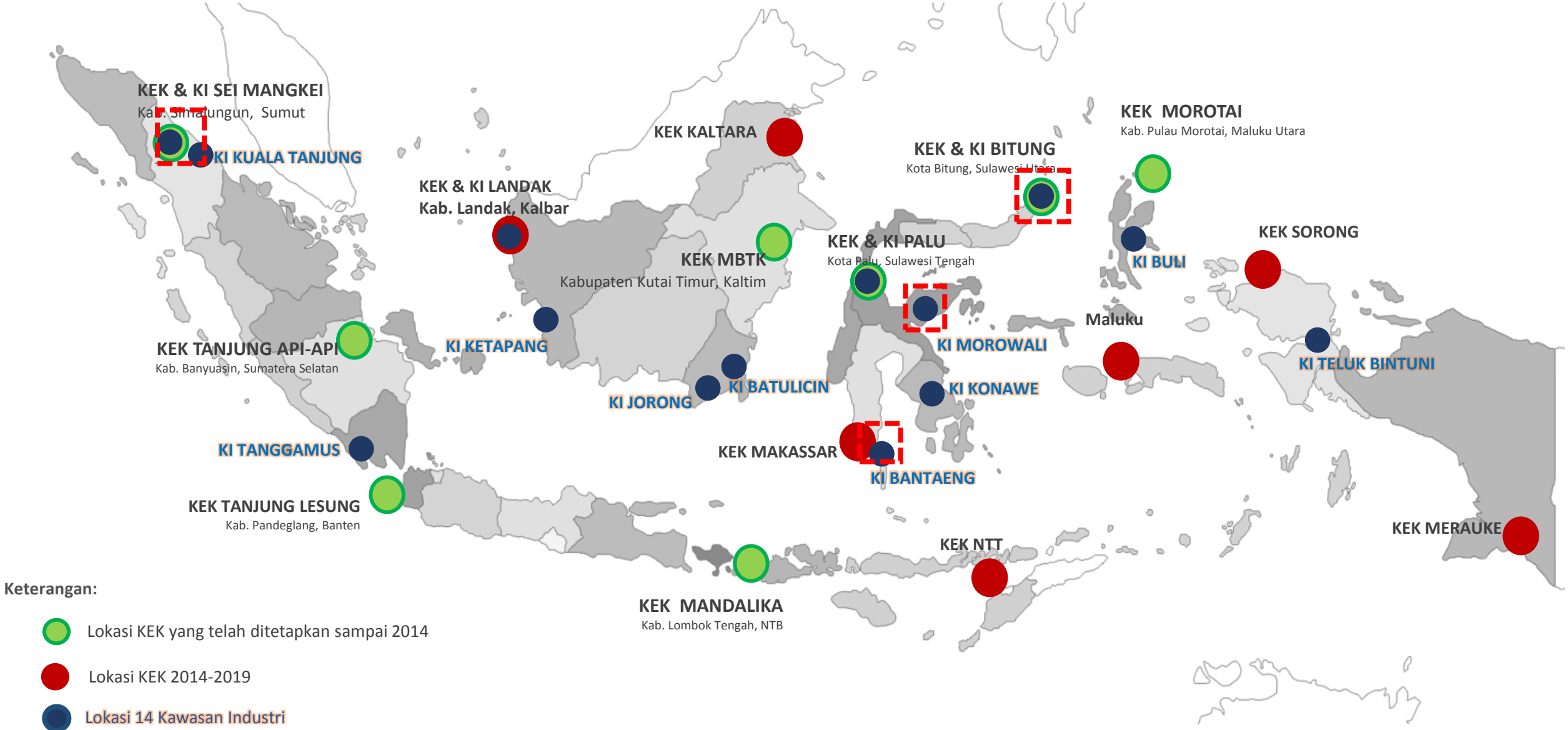

Keterangan:

- Lokasi KEK yang telah ditetapkan sampai 2014
- Lokasi KEK 2014-2019
- Lokasi 14 Kawasan Industri

PERKUATAN ASPEK SPASIAL DALAM MUSRENBANG NASIONAL (1/3)
Highlight Pembangunan Kawasan Industri & KEK Morowali dan Bitung

KAWASAN INDUSTRI DAN KEK MOROWALI

- ***Anchor Industry*** **China Tsingshan Group yang bergerak dalam bidang pembangunan smelter *ferro-nickel***
- **Penyediaan Tenaga Terampil (a.l: BLK, SMK, Akademi Komunitas)**
  - Kem Perindustrian-Peningkatan kelengkapan sarana Politeknik, termasuk perumahan dosen
  - Kem Perindustrian-Penyelenggaraan pendidikan Politeknik/Akademi Komunitas untuk 400 siswa
- **Konektivitas/Aksesibilitas**
  - Kem PUPR-Pelebaran jalan Bohonsai-Bungku 48,81 Km
  - Kem PUPR-Pelebaran Jalan Pelabuhan Bungku-Kawasan Industri 40,0 Km
  - Kem PUPR-Rekonstruksi Jalan Bahadopi-Batas Sultra 12,8 Km
  - Kemenhub-Pengembangan Bandara Morowali

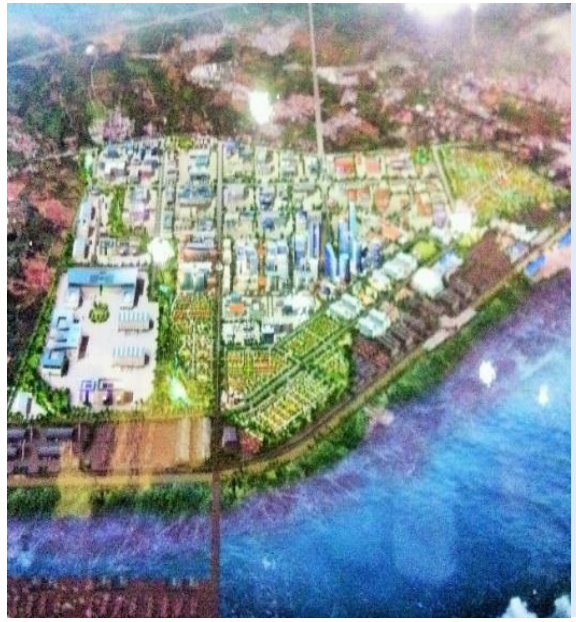

KAWASAN INDUSTRI DAN KEK BITUNG

- **Pembangunan Infrastruktur dalam Kawasan**
  - Kem Perindustrian-Pembangunan jalan poros kawasan 6 km
  - Kem Perindustrian-Pembangunan infrastruktur pengolah air bersih dan air limbah berkapasitas 3.000 L/detik
  - Kem Perindustrian-Pematangan lahan seluas 93 Ha
- **Konektivitas/Aksesibilitas**
  - Kem PUPR-Pembangunan Jalan Tol Manado Bitung 9,3 Km
  - Kemenhub dan PEMDA-Pembebasan Lahan dan Pembangunan Jaringan KA Manado-Bitung 10 Km
- **Ketersediaan Infrastruktur Dasar**
  - Kem PUPR-Rusun untuk MBR dengan PSU Pendukung (bagian dari 5.600 unit yang dicadangkan untuk KEK dan KI)

Catatan: belum termasuk dukungan belanja non K/L, DAK, dan BUMN

PERKUATAN ASPEK SPASIAL DALAM MUSRENBANG NASIONAL (1/3)
Highlight Pembangunan Kawasan Industri Bantaeng dan Sei Mangke

KAWASAN INDUSTRI BANTAENG

- ***Anchor Industry* PT. Bumi Bhakti Sulawesi dan PT. Titan yang bergerak di bidang *smelter ferro-nickel***
- **BUMD PT. Bantaeng Industrial Persada sebagai pengelola kawasan industri**
- **Ketersediaan Infrastruktur Dasar dalam Kawasan**
  - Kem Perindustrian-Pembangunan jalan poros kawasan sepanjang 3 km
  - Kem PUPR-Pembangunan Rusunawa Pekerja Industri
- **Penyediaan Tenaga Terampil (a.l BLK, SMK, Akademi Komunitas)**
  - Lanjutan pembangunan sarana pendidikan Akademi Komunitas
- **Konektivitas/Aksesibilitas**
  - Kem PUPR-Pelebaran jalan Bantaeng-Bulukumba 25 km
  - Kem PUPR-Pembangunan jalan akses menuju kawasan industri sepanjang 2 km

KAWASAN INDUSTRI DAN KEK SEI MANGKE

- ***Anchor Industry* PT. Unilever Tbk yang bergerak di bidang industri oleochemical**
- **Ketersediaan Infrastruktur Dasar dalam Kawasan**
  - Kem Perindustrian-Pembangunan jalan poros dan jalan lingkungan sepanjang 10 km di ROW 34
  - Kem PUPR-Pembangunan Rumah Susun untuk karyawan di lingkungan sekitar kawasan industri
- **Penyediaan Tenaga Terampil (a.l BLK, SMK, Akademi Komunitas)**
  - Kem Ketenagakerjaan-Peningkatan kapasitas Balai Latihan Kerja
- **Konektivitas/Aksesbilitas**
  - Kem Perhubungan-Pembangunan stasiun KA jalur Bandar Tinggi-Kuala Tanjung
  - Kem PUPR-Pemeliharaan Jalan Sei Mangkei-Simpang Mayang-Lima Puluh-Simpang Kuala Tanjung
  - Kem PUPR-Rehabilitasi Jalan Simpang Dolok Merangir-Serbelawan-Laras-Pematang Bandar-Pajak Nagari
  - Kem PUPR-Pembangunan Fly Over Sei Mangke
  - Rehabilitasi Jalan Sp. Kuala Tanjung-Kuala Tanjung

Catatan: belum termasuk dukungan belanja non K/L, DAK, dan BUMN

PERENCANAAN DENGAN ASPEK SPASIAL YANG PERLU DISKUSI INTENSIF DENGAN DAERAH

KETERSEDIAAN LAHAN DAN KESIAPAN DAERAH TERHADAP PRIORITAS NASIONAL KEDAULATAN PANGAN DI ACEH

Perlu detail lokasi untuk integrasi pencapaian sasaran (spt koordinat)

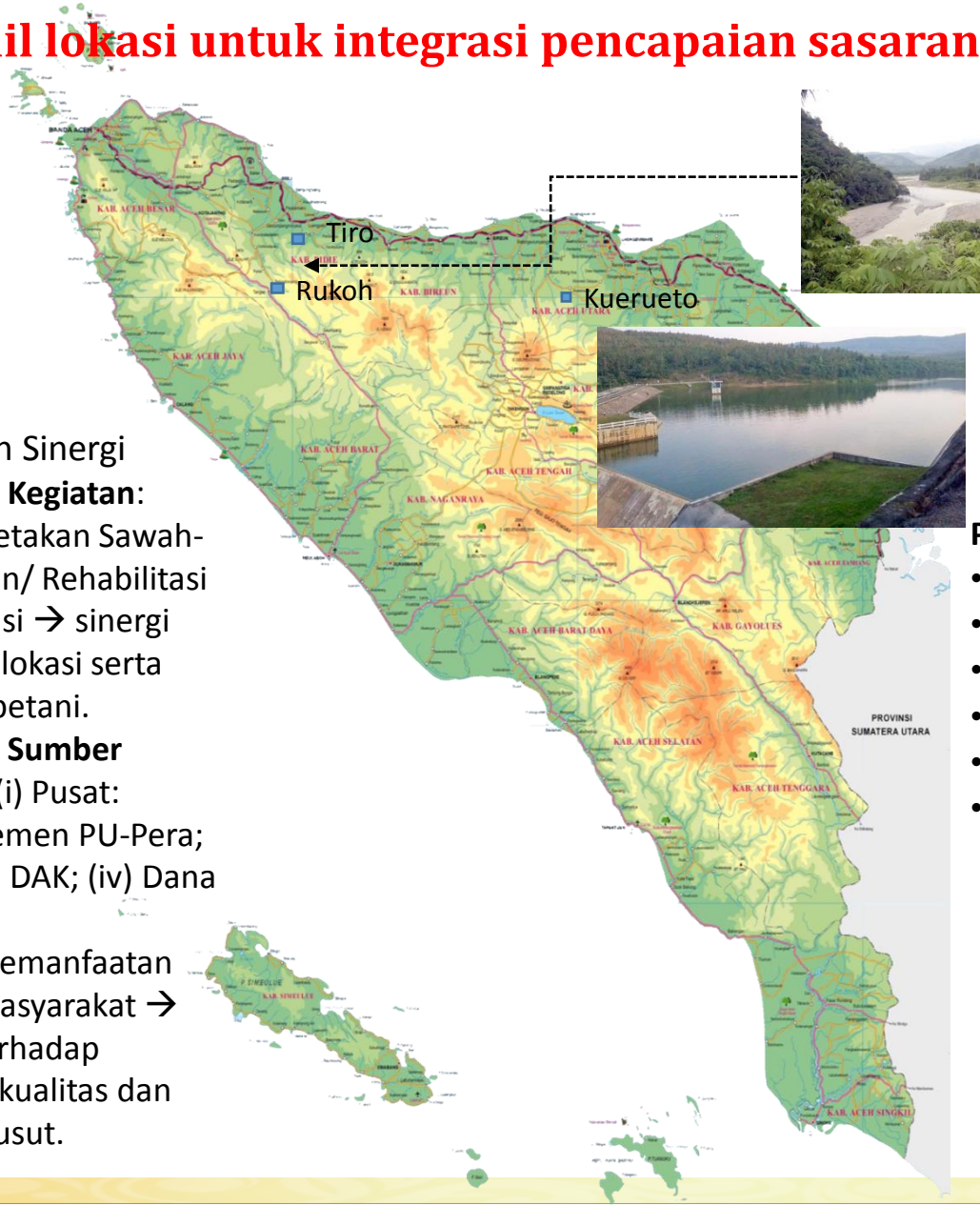

Penajaman dan Sinergi

a. Sinergi **Antar Kegiatan**: Waduk-Pencetakan Sawah-Pembangunan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi → sinergi tahapan dan lokasi serta keberadaan petani.
b. Sinergi **Antar Sumber Pendanaan**: (i) Pusat: Kementan-Kemen PU-Pera; (ii) APBD; (iii) DAK; (iv) Dana Desa.
c. Penajaman pemanfaatan Alsintan di masyarakat → efektivitas terhadap peningkatan kualitas dan penurunan susut.

Kementerian PUPR:

- Rehabilitasi Irigasi: 4.100 ha
- Pembangunan Irigasi: 2.834 ha
- Pembangunan Waduk: 1 baru (Tiro) dan 2 waduk unit lanjutan (Keureuto dan Rukoh).
- Pembangunan sarpras banjir: 4,5 km.

Kementerian Pertanian:

- Cetak sawah: 5.500 ha
- Irigasi Tersier: 5.500 ha
- Desa Mandiri Benih: 20 Desa
- Budidaya jajar legowo: 156 ribu ha

Peningkatan & Rehabilitasi Jaringan Irigasi (tersier) :

- Aceh Besar 1.000 ha
- Aceh Jaya 500 ha
- Aceh Timur 2.000 ha
- Aceh Utara 500 ha
- Pidie 1.000 ha
- Piddie Jaya 500 ha

KLHK:

- Pencadangan hutan untuk pangan: 15.309 ha
- Pemanfaatan lahan di bawah tegakan untuk pangan: 1.500 ha

BMKG:

- Informasi Iklim

Kementerian Perdagangan:

- Pembangunan pasar: 12 unit

Kementerian Kelautan dan Perikanan:

- Pengadaan kapal dan alat tangkap ikan: 320 kapal dan 13.510 alat penangkap ikan
- Benih ikan bersertifikat: 2 juta ekor
- Minapolitan: 5 lokasi

KETERSEDIAAN LAHAN DAN KESIAPAN DAERAH TERHADAP PRIORITAS NASIONAL KEDAULATAN PANGAN DI SUMATERA SELATAN

REPUBLIK INDONESIA

Kementerian PPN/ Bappenas

Perlu detail lokasi untuk integrasi pencapaian sasaran (spt koordinat)

Kementerian Pertanian:
- Cetak sawah: 4.500 ha
- Irigasi Tersier: 4.500 ha
- Desa Mandiri Benih: 20 Desa
- Budidaya jajar legowo: 373.000 ha

BMKG:
Informasi Iklim

Kementerian PUPR:
- Rehabilitasi Irigasi: 25.082 ha
- Pembangunan Irigasi: 4.809 ha
- Pembangunan Waduk: 1 buah (Komering II)
- Pengendalian Banjir: 10 km

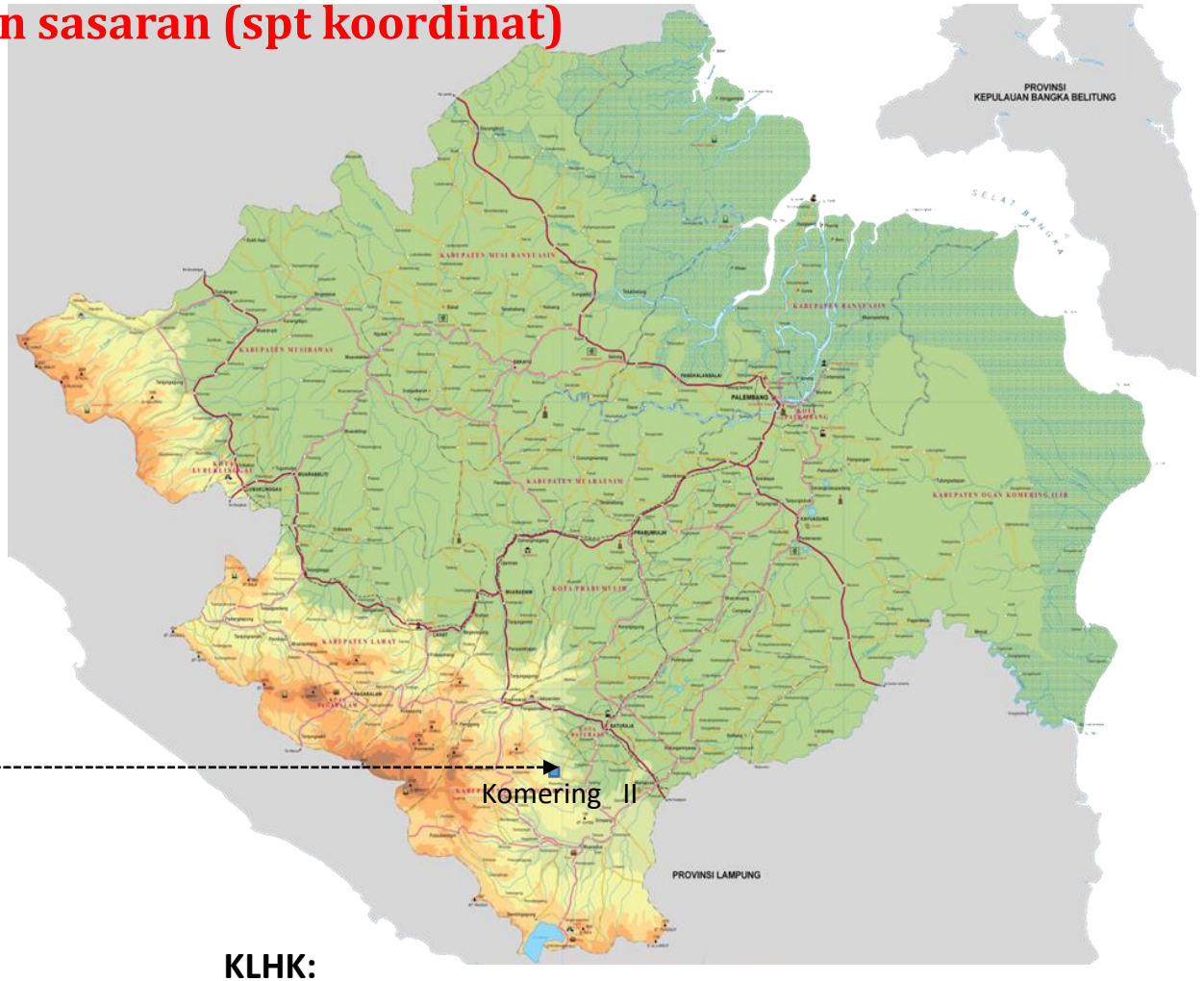

Kementerian Perdagangan:
- Pembangunan pasar: 9 unit

Kementerian Kelautan dan Perikanan:
- Pengadaan kapal dan alat tangkap ikan: 47 unit
- Benih ikan bersertifikat: 1.500.000 ekor
- Minapolitan: 8 lokasi

KLHK:
- Pencadangan hutan untuk pangan: 171.541 ha
- Pemanfaatan lahan di bawah tegakan untuk pangan: 1.500 ha

PERENCANAAN DENGAN ASPEK SPASIAL YANG MENYEBAR DI DAERAH

PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
Sasaran dan Arah Kebijakan

INDIKATOR	2014 (Baseline)	2015	2016	2017	2019
▪ Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun	8,2 tahun	8,3 tahun	8,5 tahun	8,6 tahun	8,8 Tahun
▪ Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun	94,1% (2013)	94,8%	95,1%	95,4%	96,1 %
▪ Prodi perguruan tinggi minimal berakreditasi B	50,4% (2013)	55,9%	58,8%	61,8%	68,4 %
▪ Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	68,7%	73,9%	76,5%	79,0%	84,2%
▪ Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	62,5%	68,7%	71,8%	74,8%	81,0%
▪ Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B	73,5%	77,2%	79,1%	80,9%	84,6%
▪ Pesentase Kompetensi Keahlian SMK berakreditasi minimal B	48,2%	53,8%	56,6%	59,4%	65,0%
▪ Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,85 (2012)	0,86	0,87	0,88	0,90
▪ Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,07 (2012)	0,29	0,36	0,42	0,54
▪ Nilai Test PISA	(2012)				(2018)
- Matematika	375	n.a.	n.a.	n.a.	427
- Sains	382	n.a.	n.a.	n.a.	438
- Membaca	396	n.a.	n.a.	n.a.	446
▪ Meningkatnya guru yang memiliki kompetensi profesional dan pedagogi (subject knowledge dan pedagogical knowledge)					
▪ Meningkatnya integritas lingkungan pendidikan -SD-PT- (tidak mencontek, bebas dari jual beli ijazah, sertifikat palsu, plagiarisme)					
▪ Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan menyenangkan dan bebas intimidasi serta kekerasan (bullying free environment)					
▪ Terlaksananya kurikulum dan proses pembelajaran yang progresif sesuai kebutuhan zaman					
▪ Terlaksananya pendidikan agama dan etika yang menumbuhkan akhlak mulia					

Sasaran yang akan dicapai, dengan lokasi tersebar
→
Perlu Data IG Tematik

PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
Sasaran dan Arah Kebijakan

INDIKATOR	2014 (Baseline)	2015	2016	2017	2019
Akses Air Minum Layak (%)	70,0	70,3	77,0	**84,0**	100
Akses Sanitasi Layak (%)	69,4	72,2	77,4	**83,2**	100
	Akses Layak: 61,1	Akses Layak: 62,4	Akses Layak: 66,3	**Akses Layak: 70,6**	Akses Layak: 85
	Akses Dasar: 8,3	Akses Dasar: 9,8	Akses Dasar: 11,1	**Akses Dasar: 12,4**	Akses Dasar: 15
Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (Ha)	Penanganan: 38.431 Ha (kondisi kumuh 100%) Perencanaan: 0 kab/kota	Penanganan: 38.431 Ha (kondisi kumuh 85%) Perencanaan: 116 kab/kota	Penanganan: 38.431 Ha (kondisi kumuh 70%) Perencanaan: 96 kab/kota	**Penanganan: 38.431 Ha (kondisi kumuh 45%)** **Perencanaan: 121 kab/kota**	Penanganan: 38.431 Ha (kondisi kumuh 0%) Perencanaan: -
Kekurangan Tempat Tinggal Berdasarkan Perspektif Menghuni (Juta Rumah Tangga)	7,6	7,0	6,5	**6,0**	5,0
Sungai Bebas Sampah	n.a	n.a	n.a	**Percontohan: Ciliwung, Cikapundung, Kali Garang**	Percontohan: Ciliwung, Cikapundung, Kali Garang

Sasaran Yang belum teridentifikasi lokasi
→
Perlu Data IG Tematik

HIGHLIGHT PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
Peta Sebaran Indikasi Pembangunan Perumahan Tahun 2017

REPUBLIK INDONESIA

Kementerian PPN/ Bappenas

LOKASI tergantung pada kesiapan setiap daerah dalam memenuhi *readiness criteria*

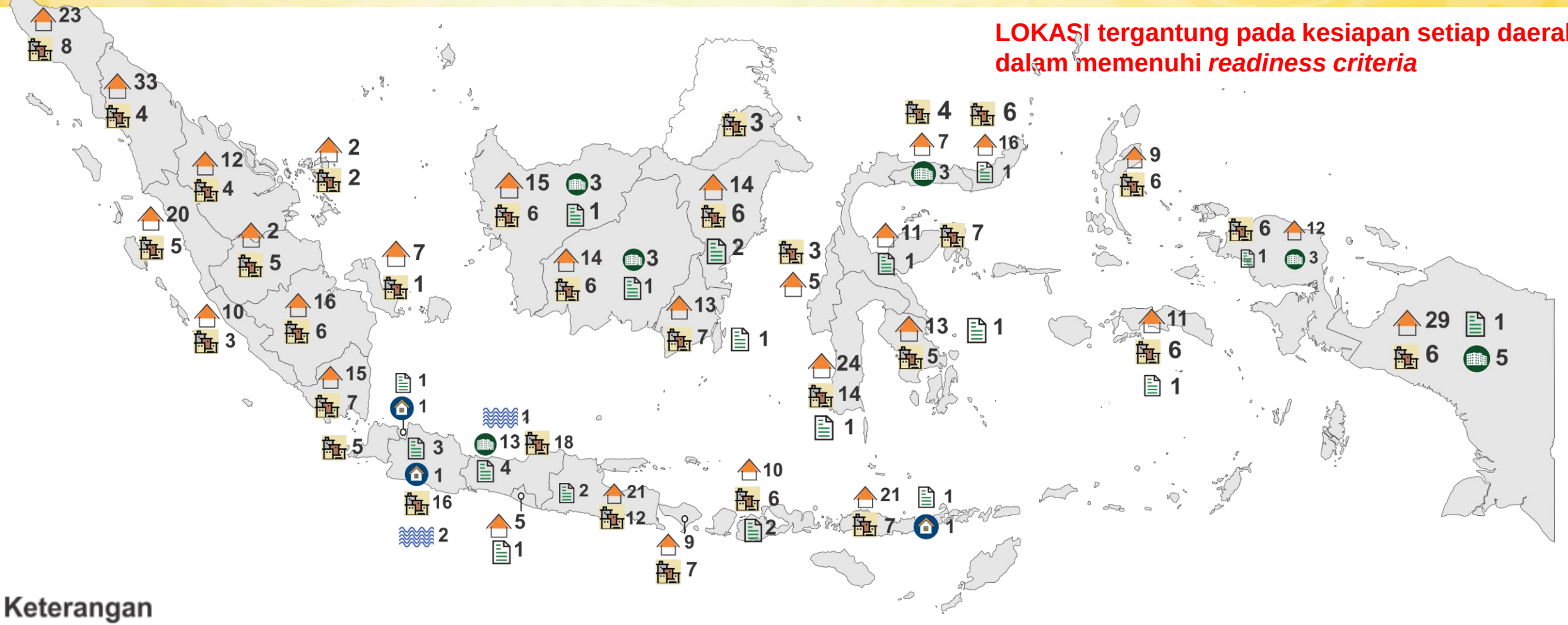

Keterangan

- Pilot Project Teknologi Perumahan (jumlah Kab/Kota)
- Peningkatan kualitas rumah swadaya (jumlah Kab/Kota)
- Pemenuhan SPP dan Kota Layak Huni (jumlah Kab/Kota)
- Pembangunan Rusunawa (jumlah Kab/Kota)
- Peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan (jumlah Kab/Kota)
- Sungai bebas sampah (Percontohan) (jumlah sungai)

PERAN INFORMASI GEOSPASIAL DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

Kementerian PPN/ Bappenas

ARAHAN PEMBANGUNAN

RPJPN 2005-2015

1. Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah
2. Pengembangan Pusat-pusat Pertumbuhan berbasis Keunggulan Potensi Wilayah
3. Pemerataan Pelayanan Sosial Dasar

NAWA CITA KABINET KERJA

BASIS DATA

Data Statistik

Informasi Geospasial

DASAR PERENCANAAN

Rencana Tata Ruang

Pengelolaan Pertanahan

PENDEKATAN KEWILAYAHAN

- Sistem Perkotaan Nasional
- Kawasan Cepat Tumbuh
- Kawasan Khusus
- Kawasan Perbatasan
- Daerah Tertinggal
- Kawasan Rawan Bencana
- Pengembangan Ekonomi Lokal
- Perdesaan

Model Spasial Dinamis

Skenario & Strategi Pengembangan Wilayah Pulau-Pulau Besar dan Provinsi (Buku III RPJMN).

OUTCOMES

1. Berkurangnya Kesenjangan Antar Wilayah	Gini Rasio ⇧ Indeks Williamson ⇩ Indeks Theil ⇧
2. Tumbuhnya Pusat-pusat Pertumbuhan berbasis Keunggulan Potensi Wilayah, khususnya di KTI	Jumlah Pusat Pertumbuhan ⇧ Konektivitas ⇧
3. Meratanya Pelayanan Sosial Dasar di Seluruh Wilayah Indonesia	IPM ⇧

DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH

TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

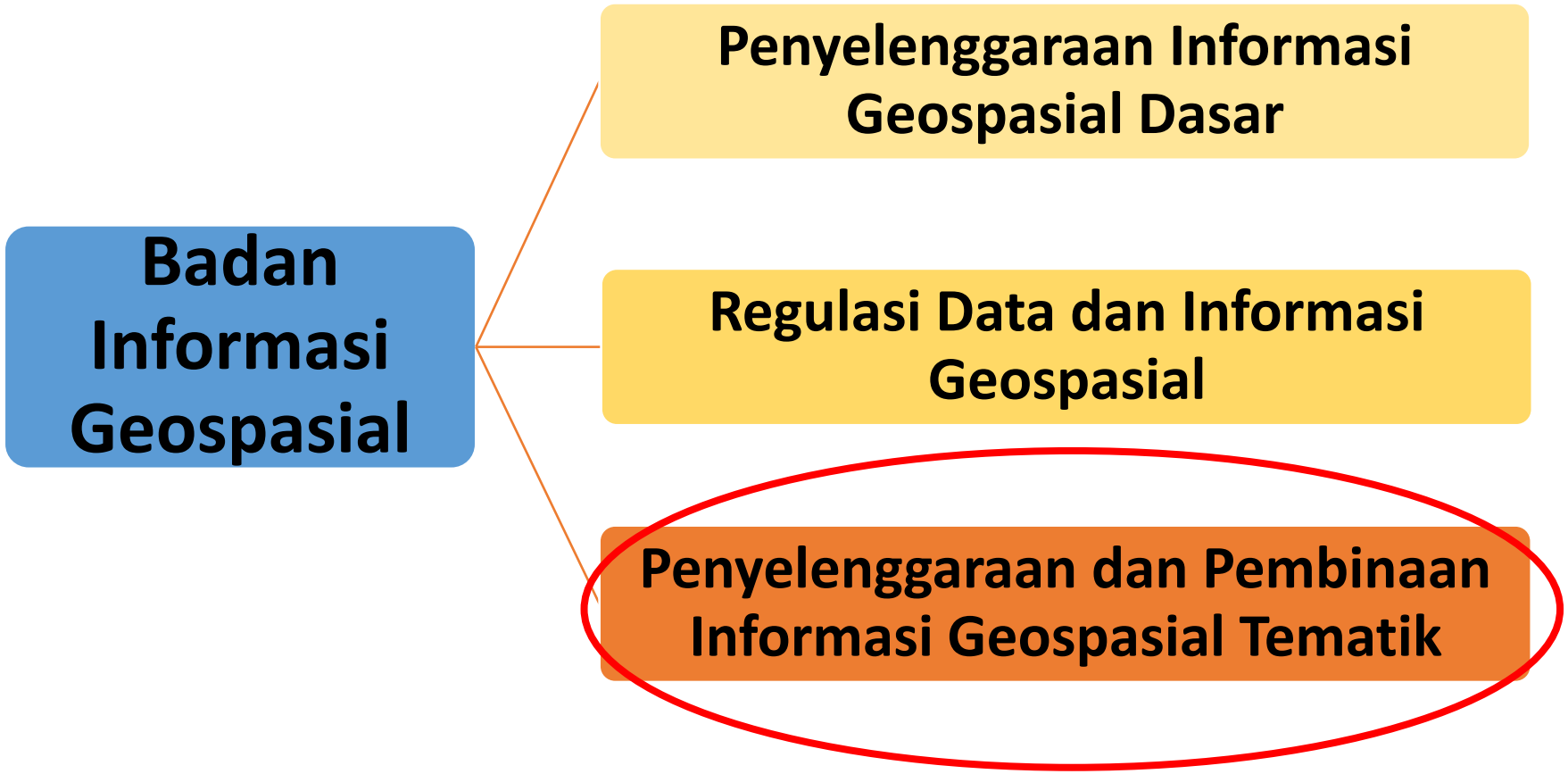

PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL DASAR

Pasal 17 (1)	• Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar secara bertahap dan sistematis untuk seluruh wilayah NKRI dan wiayah yurisdiksinya
Pasal 17 (2)	• Pemutakhiran Informasi Geospasial Dasar secara periodik dalam jangka waktu tertentu
Pasal 17 (3)	• Pemutakhiran Informasi Geospasial Dasar secara isidental jika terjadi perubahan unsur Informasi Geospasial Dasar
Pasal 17 (4)	• Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemutakhiran Informasi Geospasial Dasar
Pasal 45 (1)	• Pelaksanaan jaringan Informasi Geospasial (yang telah dibangun oleh Pemerintah)

REGULASI DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL

Pasal 27 (1) (2)	• Penyusunan tata cara dan standar pengumpulan Data Geospasial
Pasal 32 (3)	• Pemberian izin untuk mengolah Data Geospasial dan Informasi Geospasial di luar negeri
Pasal 34 (1)	• Penyusunan Standar Pemrosesan Data Geospasial
Pasal 34 (2)	• Penyusunan format metadata dan/ atau riwayat Informasi Geospasial
Pasal 38 (1)	• Penyusunan standar prosedur penyimpanan dan mekanisme penyimpanan untuk pengarsipan Data Geospasial dan Informasi Geospasial

PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK

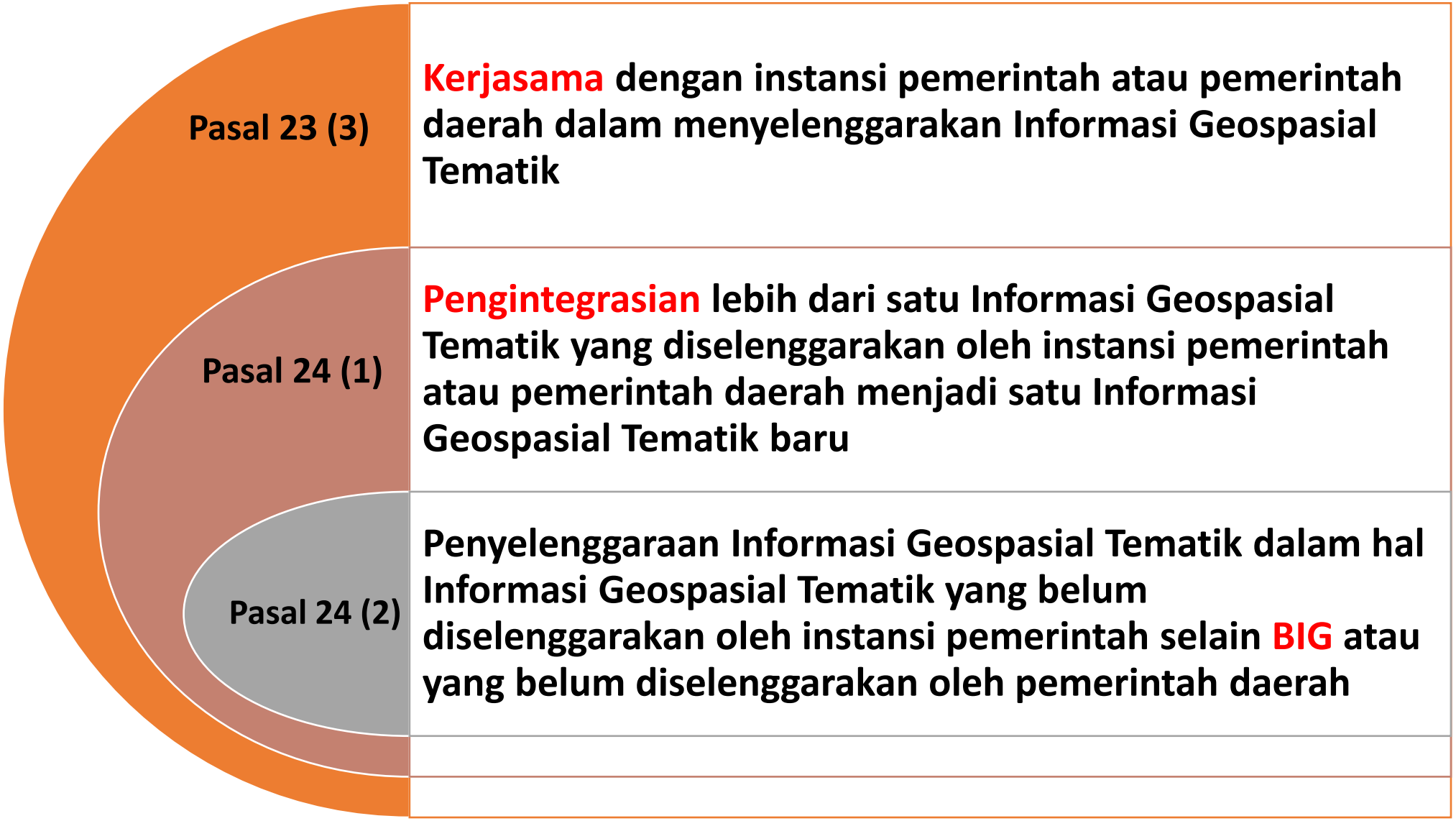

PROSES HULU-HILIR INFORMASI GEOSPASIAL

Regulasi, Koordinasi, Produksi, Distrubusi, Penyimpanan, Kelembagaan, SDM, Pembiayaan, dll

1. Sistem Referensi Spasial
- Kerangka Dasar H/V
- Data Gaya Berat
- Pasang Surut Laut

- **2. Standar, Norma, Prosedur, Mekanisme**
- **3. SDM Bersertifikat**

Metode Akuisisi Data/Survei
- Survey Teresterial
- Penginderaan Jauh
- Foto Udara
- Citra Satelit Orthorektifikasi
- Survey Multiteam
- dll

Peta Dasar
- Peta RBI
- Peta Topografi
- Ortho Image
- Peta Bathimetri
- Peta Oseanografi
- Peta Pertanahan
- dll

Peta Tematik

Peta : Lereng, Geologi, Sistem Lahan, Tanah, DAS dan SubDAS, Sumberdaya Air, Zona Agroklimat, Penggunaan Lahan. Kesesuaian/ kemampuan Lahan, Kebencanaan, Pesisir dan Laut, Ekoregion, Status Lahan, Demografi, PLP2B, Neraca SDA ,

Dan lain-lain

Rakornas Informasi Geospasial

Kesepahaman &Kesepakatan

KEBIJAKAN SATU PETA (KSP) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- 85 Peta Tematik

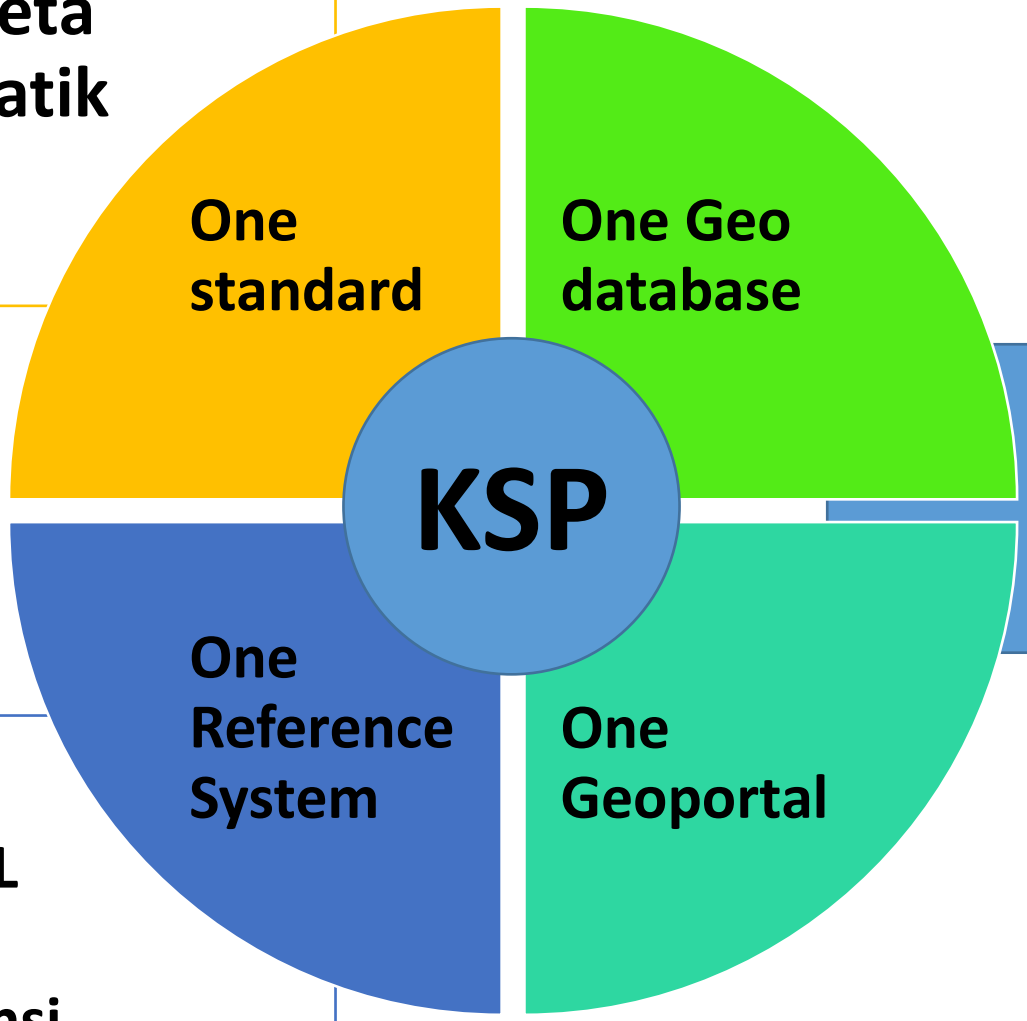

- 19 K/L
- 34 Provinsi

22 PRIORITAS NASIONAL DALAM RKP TAHUN 2017

REPUBLIK INDONESIA

22 PN, 3 Dimensi, Kondisi Perlu dan Faktor Pendorong Pertumbuhan

Kementerian PPN/ Bappenas

DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA	DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN	DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN	KONDISI PERLU	FAKTOR PENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI
• Revolusi Mental • Pembangunan Pendidikan • Pembangunan Kesehatan • **Pembangunan Perumahan dan Permukiman**	• **Kedaulatan Pangan** • **Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan** • **Kemaritiman dan Kelautan** • Pembangunan Pariwisata • Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi	• **Pemerataan Antarkelompok Pendapatan** • Daerah Tertinggal • Kawasan Perbatasan • **Pembangunan Perdesaan** • Pembangunan Perkotaan • Pengembangan Konektivitas Nasional • Reforma Agraria	• Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi • Stabilitas Keamanan dan Ketertiban • **Kepastian dan Penegakan Hukum** • Reformasi Birokrasi • Reformasi Regulasi	• Peningkatan Ekspor Non Migas • Peningkatan Iklim Investasi • Kemampuan Fiskal

1. IGD: Peta RBI dan LPI [minimal skala 1:50.000]
2. IGT sektoral [minimal skala 1:50.000]:
    a. Kedaulatan pangan dan energi
    b. Kemaritiman
    c. Infrastruktur
    d. Pariwisata
    e. Kebencanaan
3. IGT integrasi

CONTOH DUKUNGAN INFORMASI GEOSPASIAL TERHADAP PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2017

Kementerian PPN/ Bappenas

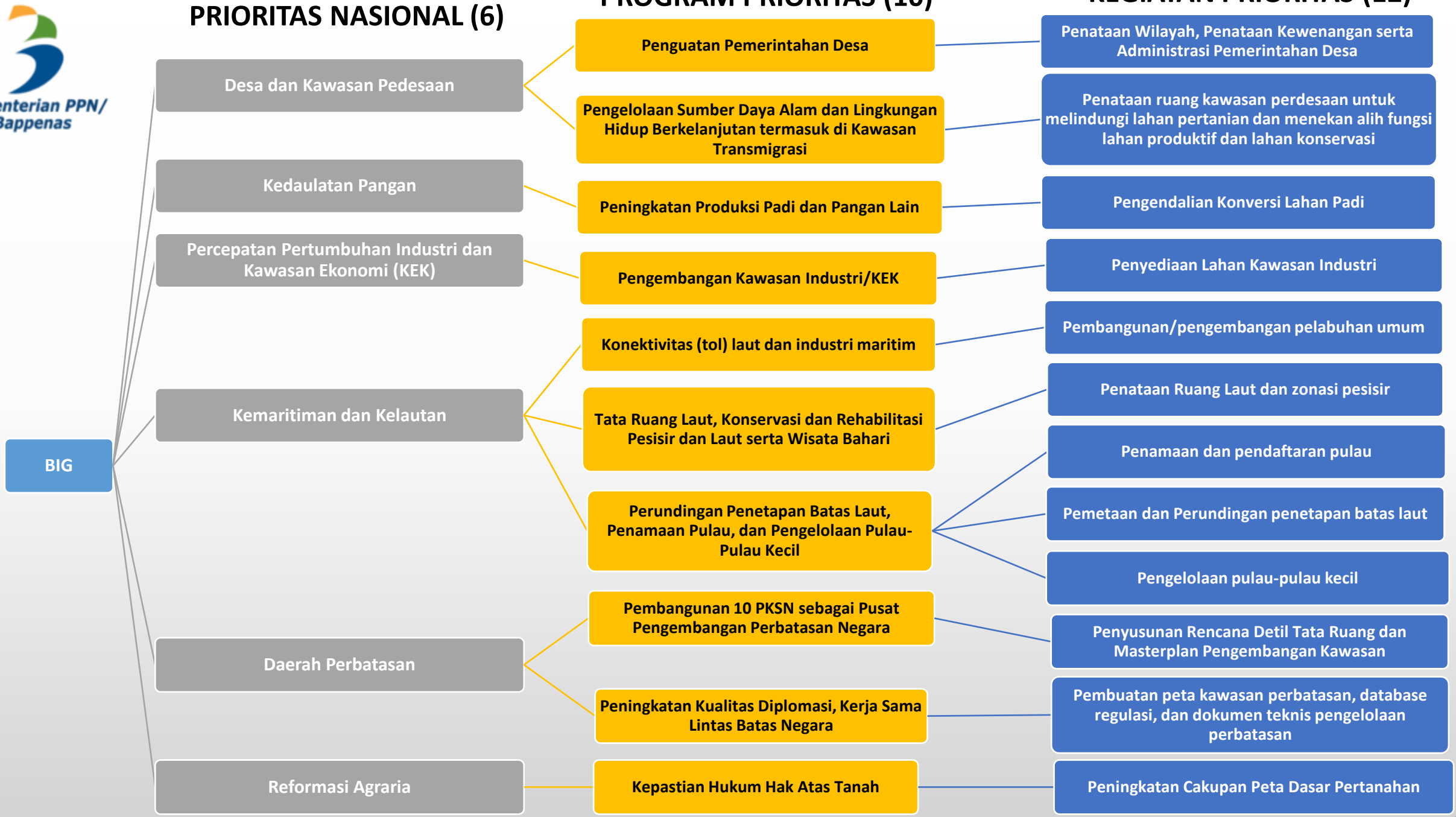

RANCANGAN RKP 2017
PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTAN (1/3)

REPUBLIK INDONESIA

Kementerian PPN/ Bappenas

LEVEL 1

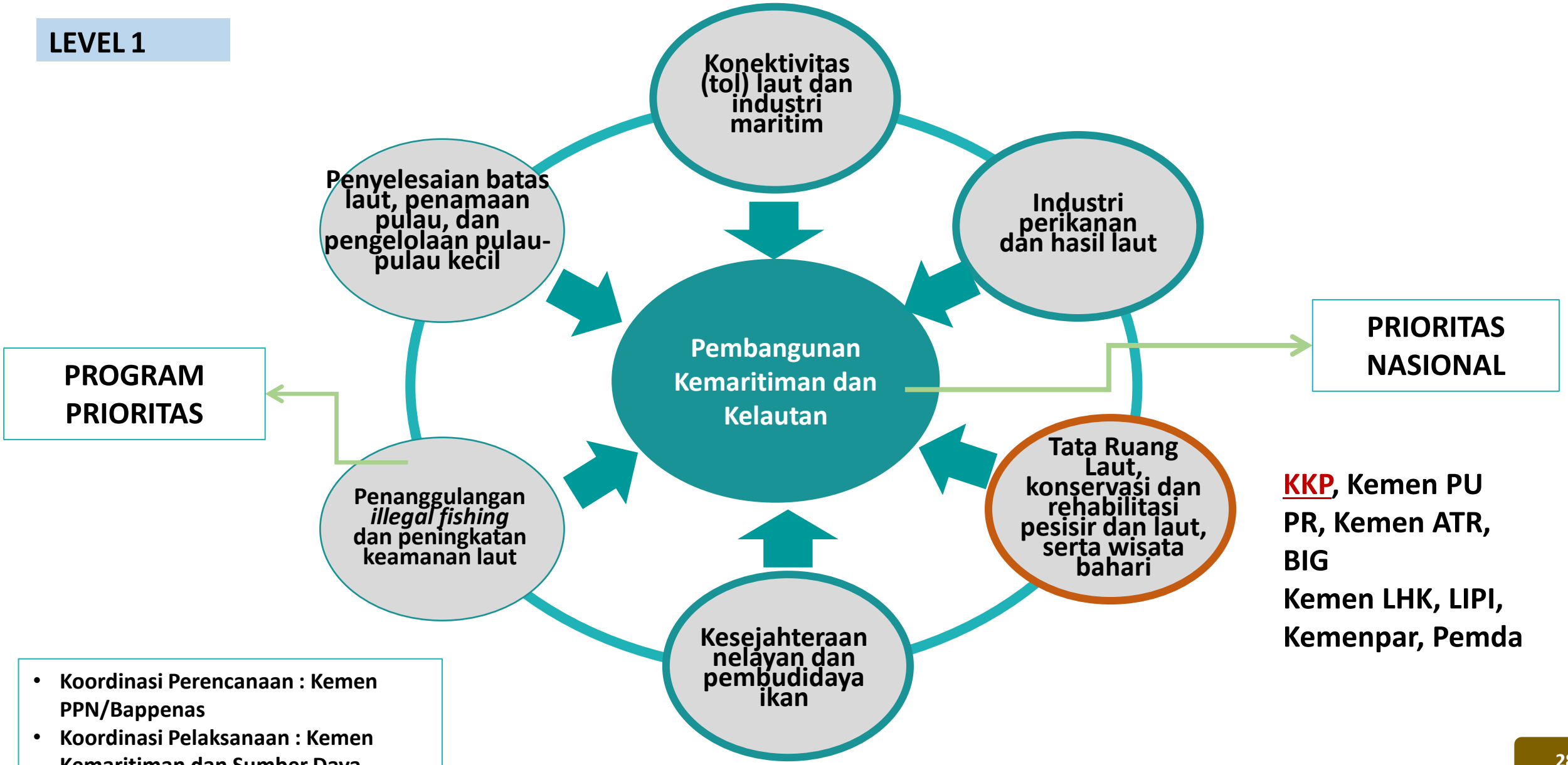

KKP, Kemen PU PR, Kemen ATR, BIG
Kemen LHK, LIPI, Kemenpar, Pemda

- Koordinasi Perencanaan : Kemen PPN/Bappenas
- Koordinasi Pelaksanaan : Kemen Kemaritiman dan Sumber Daya

RANCANGAN RKP 2017
PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTAN (2/3)

LEVEL 2

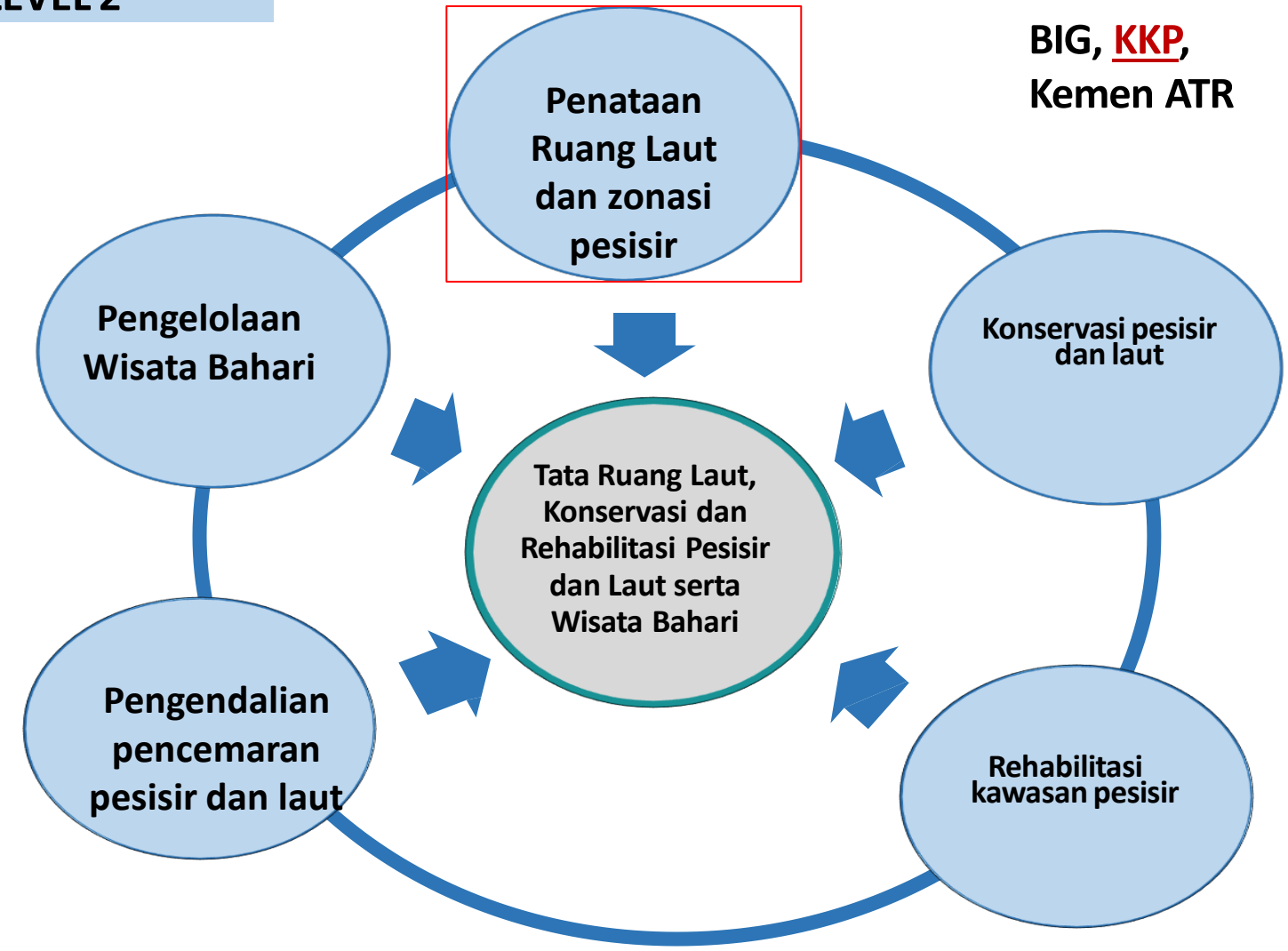

BIG, KKP, Kemen ATR

- Informasi Geospasial Dasar dan Tematik, Pemetaan kelautan dan data batimetri – BIG
- Rencana tata ruang laut nasional – KKP, ATR
- Rencana zonasi laut antar wilayah KSN dan KSNT – KKP
- Akselerasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Laut Provinsi – KKP, Kemendagri, pemda

RANCANGAN RKP 2017
MATRIKS PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTAN (3/3)

Kegiatan Utama	Kegiatan Pendukung	K/L	Program	Kegiatan	Sasaran	Indikator	Lokasi	Target 2017	Alokasi (Juta Rp.)
Mendesain tata ruang pesisir dan lautan	Pengelolaan Tata Ruang Laut	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Program Pengelolaan Ruang Laut	Perencanaan Ruang Laut	Tersusunnya rencana zonasi di wilayah laut, selat, dan teluk antar wilayah	Jumlah wilayah laut antar wilayah, KSN dan KSNT yang memiliki rencana zonasi ditetapkan melalui peraturan perundangan	*)	*)	*)
		KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Program Pengelolaan Ruang Laut	Perencanaan Ruang Laut	Tersusunnya dokumen Rencana Tata Ruang Laut Nasional	Perairan laut NKRI yang memiliki Dokumen RTRLN	*)	*)	*)
		BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	Pemetaan Tata Ruang dan Atlas	Tersedianya data spasial untuk penyusunan RZWP3K	Jumlah IGD dan IGT untuk penyusunan RZWP3K	*)	*)	*)

*) masih dalam pembahasan pada forum pelaksanaan penyusunan RKP 2017

REPUBLIK INDONESIA

CONTOH PEMANFAATAN INFORMASI GEOSPASIAL DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL: USULAN PEMERINTAH DAERAH

Kementerian PPN/ Bappenas

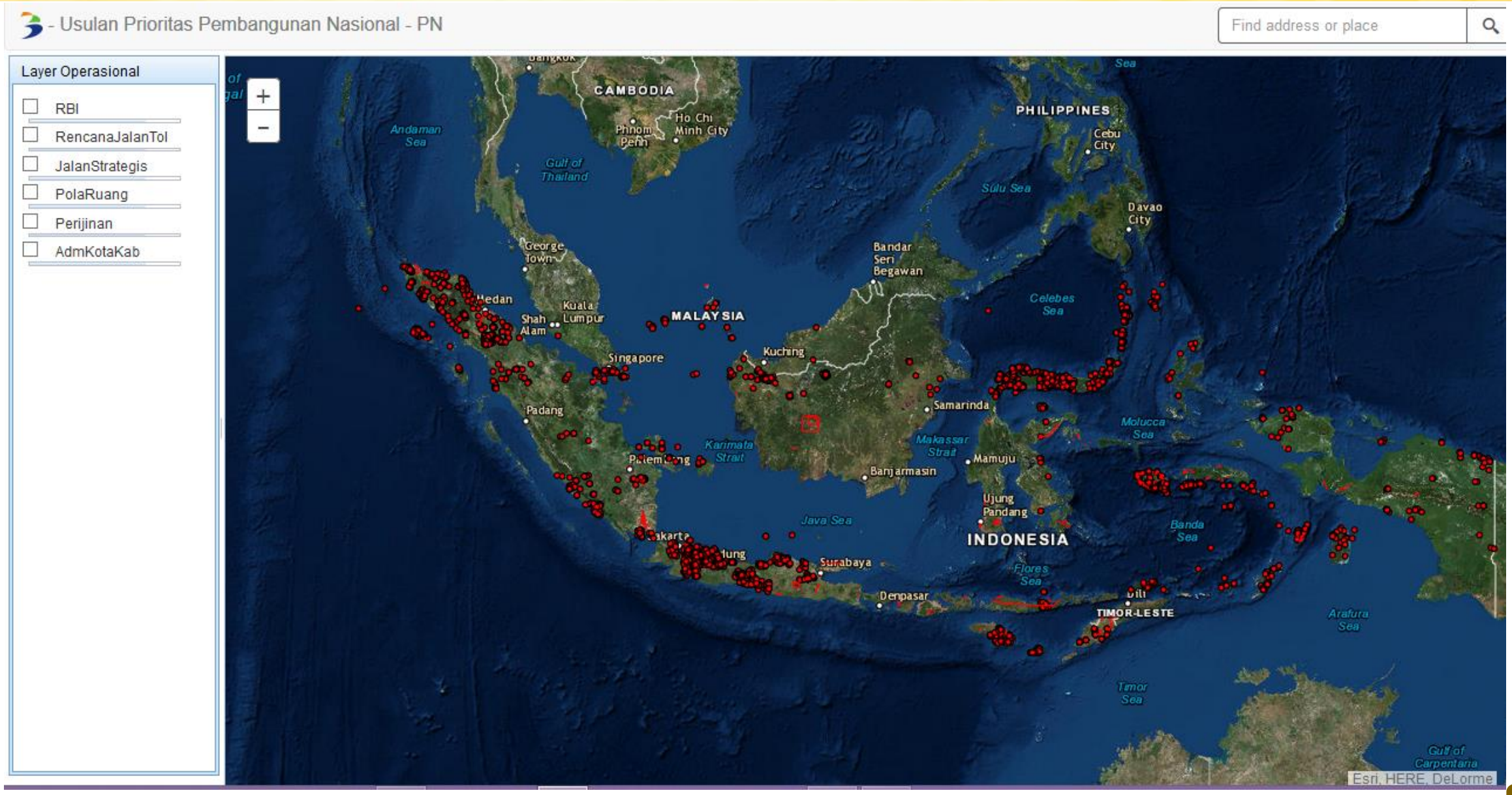

KESIMPULAN

- Kementerian/Lembaga perlu mengidentifikasi dukungan informasi geospasial sesuai lingkup tugas masing-masing dalam pencapaian prioritas nasional.
- Proses penyusunan RKP yang dilaksanakan oleh Bappenas akan memastikan kegiatan KSP teralokasikan dananya.
- Target KSP perlu didetailkan setiap tahunnya.
- Perlu kerjasama dan komitmen seluruh K/L walidata untuk memastikan target dalam rencana aksi tercantum di dalam RKP pada setiap langkah pelaksanaan penyusunan RKP setiap tahunnya dan mengalokasikan anggarannya.

TERIMA KASIH